

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM UPAYA
MENGATASI MASALAH EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID 19 DI
NAGORI SILOU HULUAN KECAMATAN RAYA KABUPATEN
SIMALUNGUN**

SKRIPSI

OLEH:

CYNTHIA LAWRENCY SARAGIH

188510007



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)9/12/22

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM UPAYA
MENGATASI MASALAH EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID 19 DI
NAGORI SILOU HULUAN KECAMATAN RAYA KABUPATEN
SIMALUNGUN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH:

CYNTHIA LAWRENCY SARAGIH

188510007

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)9/12/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya
Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 Di
Nagori Silou Huluhan Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.

Nama Mahasiswa : Cynthia Lawrence Saragih

Npm : 188510007


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP


Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP

Mengetahui:


Dekan
Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si


Kaprodi Ilmu Pemerintahan
Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

Tanggal Lulus: 29 September 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 29/09/2022



Cynthia Lawrency Saragih

188510007

iii

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)9/12/22

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cynthia Lawrency Saragih

Npm : 188510007

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : *Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 Di Nagori Silou Huluan Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.*

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 20 Oktober 2022
Yang Menyatakan

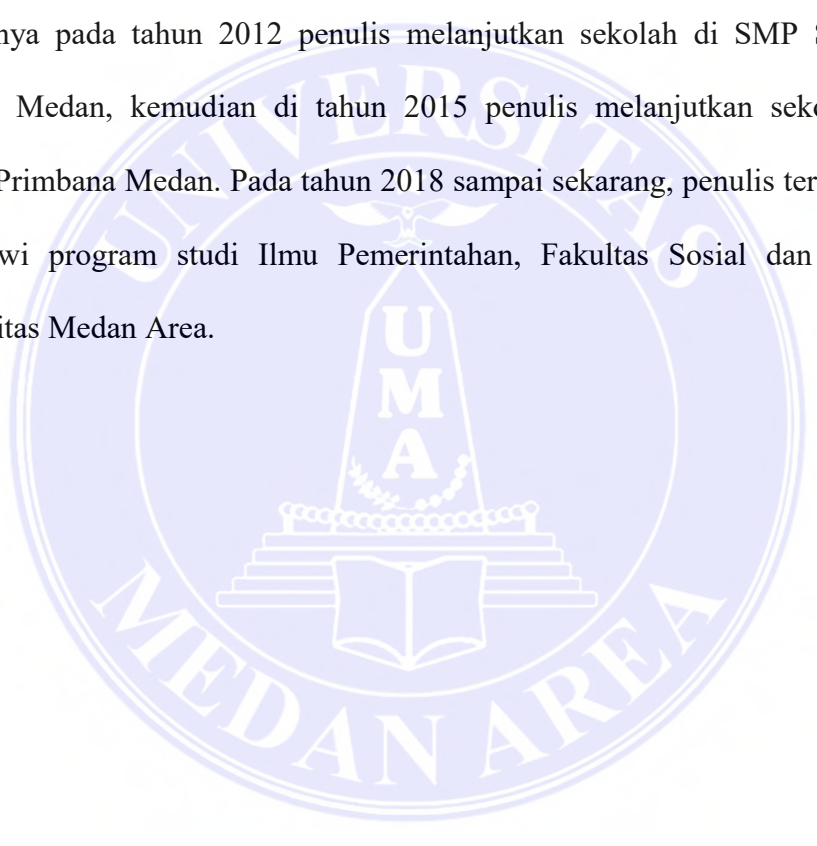


Cynthia Lawrency Saragih
188510007

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Cynthia Lawrency Saragih, anak dari Mangiring Saragih dan Rosmaida Br. Purba. Lahir di Medan pada tanggal 10 Agustus 2000. Penulis merupakan anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 068003 Medan pada tahun 2006, selanjutnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan sekolah di SMP Swasta Mulia Pratama Medan, kemudian di tahun 2015 penulis melanjutkan sekolah di SMA Swasta Primbana Medan. Pada tahun 2018 sampai sekarang, penulis terdaftar sebagai mahasiswi program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Pada masa pandemic covid 19 yang terjadi di Indonesia membuat perekonomian menurun sehingga muncul masyarakat baru tidak mampu. Tanpa terkecuali hal tersebut terjadi di Nagori Silou Hulan, dimana masyarakatnya yang bekerja sebagai petani penghasilan mereka menurun. Apalagi pada saat baru masuknya virus covid-19 ini, pemerintah melakukan lockdown. Akibatnya pengiriman barang keluar daerah tidak bisa. Masyarakat tidak mampu/miskin semakin tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program bantuan sosial tunai terhadap masyarakat yang tidak mampu yang terdampak pada kondisi wabah virus Covid-19 di Nagori Silou Hulan dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam implementasi program BST di Nagori/Desa Silou Hulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk mengukur suatu implementasi menurut teori Van Meter dan Van Horn ada enam indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Nagori Silou Hulan, Gamot/Kepala Dusun Rindung, Operator Desa dan masyarakat Nagori Silou Hulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial tunai masih belum bisa dikatakan berjalan dengan efektif dalam penyaluran bantuan untuk membantu masyarakat tidak mampu/miskin. Dapat dilihat dari proses pendataan tidak dilakukan oleh pemerintah desa, akibatnya masih ada masyarakat tidak mampu/miskin yang tidak dapat BST. Serta juga dana bantuan sosial tunai ini tidak ada jadwal tetap dalam pencairan, sehingga mengakibatkan proses pencairan tidak berjalan dengan semestinya. Padahal bantuan sosial tunai ini pemanfaatannya digunakan untuk kebutuhan pokok.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Sosial Tunai, Program

ABSTRACT

During the COVID-19 pandemic that occurred in Indonesia, the economy declined so that new people who could not afford it emerged. This is without exception in Nagori Silou Huluan, where the people who work as farmers have decreased their income. Especially when the Covid-19 virus has just entered, the government has implemented a lockdown. As a result, the delivery of goods out of the region cannot. Poor/poor people are getting poorer. This study aims to find out how the implementation of the cash social assistance program for underprivileged communities affected by the Covid-19 virus outbreak in Nagori Silou Huluan and to find out what are the obstacles in implementing the BST program in Nagori/Silou Huluan Village. This study uses a qualitative research method with a descriptive type. This study uses the theory of Van Meter and Van Horn there are six indicators, namely the size and objectives of policies, resources, communication between organizations and strengthening activities, characteristics of implementing agents, attitudes of implementers and the economic, social and political environment. Informants in this study were the Village Head of Nagori Silou Huluan, Gamot/Head of Dusun Rindung, Village Operators and the people of Nagori Silou Huluan. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the cash social assistance program still cannot be said to be running effectively in the distribution of assistance to help the poor/poor. It can be seen from the data collection process that the village government was not carried out, as a result there were still poor/poor people who did not get BST. Also, there is no fixed schedule for disbursing cash social assistance funds, resulting in the disbursement process not running properly. Whereas cash social assistance is used for basic needs.

Keywords: Implementation, Cash Social Assistance, Program

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 Di Nagori Silou Huluan Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dalam penulisan Skripsi ini, dengan segala kemampuan yang ada. Masih banyak terdapat kekurangan dan mungkin masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun maupun mengarah kepada penyempurnaan Skripsi ini. Sehingga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan kerjasama secara materi maupu moril dari berbagai pihak, khususnya dosen pembimbing, maka untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

3. Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.SI selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu pikiran dan tenaga dalam memberikan bimbingan serta saran kepada penulis.
5. Ibu Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak saran dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini, sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Fahrul Azmi, S.Sos, M.AP selaku Sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dan memberikan pengetahuan kepada penulis dalam skripsi ini.
7. Kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi mata perkuliahan serta staf tata usaha yang membantu penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Drs. Edi Sinaga selaku Kepala Desa Nagori Silou Huluan Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, Bapak Lepson Purba selaku Kepala Dusun Rindung, Bapak Muhtar Parulian Purba selaku Operator Desa, dan masyarakat penerima bantuan sosial tunai yang telah membantu dan memberikan informasi selama pelaksanaan penelitian dilakukan.
9. Orang tua tercinta, Ayahanda Mangiring Saragih dan Ibunda Rosmaida Purba yang sudah memberikan doa tulus dan semangat kepada penulis dan juga

yakni Abang pertama Florencius Pardamaian Saragih dan Adik Perempuan Linggom Hiskiani Saragih.

10. Rekan-rekan mahasiswa stambuk 2018 program studi Ilmu Pemerintahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah saling membantu dan memberikan dorongan moral dalam penulisan skripsi ini.

Atas bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus sebesar-besarnya. Semoga Tuhan melimpahkan berkatnya serta membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 29 September 2022

CYNTHYA LAWRENCY SARAGIH

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Kebijakan	7
2.1.1 Pengertian Kebijakan	7
2.1.2 Jenis-jenis Kebijakan	7
2.2 Implementasi Kebijakan	8
2.2.1 Pengertian Implementasi	8

2.3	Pemerintah	13
2.3.1	Pengertian Pemerintah	13
2.3.2	Fungsi Pemerintah	14
2.3.3	Tujuan Pemerintah	15
2.4	Bantuan Sosial (BST)	16
2.5	Studi Relevan	19
2.6	Kerangka Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Jenis Penelitian	27
3.2	Sifat Penelitian	28
3.3	Lokasi Penelitian	28
3.4	Informan Penelitian	30
3.5	Teknik Pengumpulan Data	30
3.6	Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		34
4.1	Hasil Penelitian	34
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.2	Visi dan Misi	35
4.1.3	Demografi	36
4.1.4	Struktur Organisasi Perangkat Desa Nagori Silou Hulan....	42
4.1.5	Tugas pokok dan fungsi perangkat Desa Nagori Silou Hulan.....	43
4.2	Pembahasan	45

4.2.1 Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Nagori Silou Huluan	45
4.2.2 Ukuran dan Tujuan Kebijakan	46
4.2.3 Sumber Daya	49
4.2.4 Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas	52
4.2.5 Karakteristik Agen Pelaksana	55
4.2.6 Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana	57
4.2.7 Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	59
4.3 Hambatan Kantor Pangulu dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai	62
BAB V PENUTUP	66
5.1 KESIMPULAN	66
5.2 SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN 1 DOKUMENTASI PENELITIAN	71
LAMPIRAN 2 DAFTAR INFORMAN	77
LAMPIRAN 3 PEDOMAN WAWANCARA	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian	26
Bagan 4.1 : Struktural Organisasi Kantor Kepala Desa Nagori Silou Huluan	42



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Waktu Penelitian	29
Tabel 4.1 : Tingkat Pendidikan di Nagori Silou Huluan	35
Tabel 4.2 : Sarana dan Prasarana di Nagori Silou Huluan	40
Tabel 4.3 : Nama Penerima Bantuan Sosial Tunai	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara yang berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademis maupun praktisi. Namun kondisi alam yang mendukung tidak membuat masyarakat hidup sejahtera dan terpenuhi kebutuhan pangannya. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana seorang individu tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan pokoknya, seperti kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana taraf hidup seseorang individu mengalami kekurangan atau tidak memiliki harta benda untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, individu yang tergolong kedalam kategori masyarakat miskin, tentunya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Pada pandemic ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian, akibatnya menimbulkan masyarakat baru miskin atau tidak mampu serta anjloknya perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Wabah virus covid ini memukul banyak sector usaha yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan menurunkan penyerapan tenaga kerja.

Pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, petani hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian termasuk di pusat-pusat perbelanjaan.

Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meningkat.

Upaya pemerintah untuk menjaga dampak kebijakan pencegahan *Covid-19* dan berupaya untuk memulihkan kondisi, salah satunya dengan memberikan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat yang terdampak pandemi agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa *Covid-19*. Hal ini dilakukan sampai ditingkat masyarakat terbawah atau desa melalui program jaring pengaman sosial.

Dimasa Pandemi ini, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program-program perlindungan sosial yang salah satunya berupa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak sosial ekonomi dari pandemi *Covid-19* ini. Salah satu program yang diluncurkan oleh

pemerintah melalui Kementerian Sosial adalah Program Bantuan Sosial Tunai atau Bansos Tunai .

Bantuan Sosial Tunai ini adalah program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada masa pandemic covid-19 dengan tujuan guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat dengan syarat dimana keluarga mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bantuan ini disalurkan melalui PT. Pos Indonesia dan Bank Himbara.

Mengenai Program BST, sudah diatur dalam Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020, tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Kebijakan ini di keluarkan untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Berdasarkan hasil pra penelitian bahwa masalah yang terjadi di Nagori Silou Hulan mengenai program bantuan sosial tunai yaitu pendataan yang tidak dilakukan oleh pemerintah Nagori Silou Hulan, melainkan dari pihak Kemensos. Seharusnya pendataan dilakukan oleh kepala desa atau kepala lingkungan karena bantuan ini merupakan program baru yang dikeluarkan Kementerian Sosial. Proses

pendataan seharusnya dilakukan oleh kepala desa atau kepala lingkungan kemudian dikirim ke camat lalu ke dinas sosial kemudian ke Kementerian Sosial. Kemudian data yang diperoleh Kemensos dari Camat serta yang mendapatkan bantuan tersebut masyarakatnya itu-itu saja. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman masyarakat terhadap pemerintah Nagori Silou Huluan dan menyebabkan pendataan tidak tepat sasaran. Proses pencairan dana pun tidak menentu padahal pemanfaatan dana bantuan ini digunakan untuk kebutuhan pokok. Dana bantuan sosial tunai ini di ambil di kantor pos sehingga membuat masyarakat di Nagori Silou Huluan harus ke kantor pos yang berlokasi di Raya dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam dikarenakan jalan dari Nagori Silou Huluan ke Raya tidak bagus.

Maka berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penullis tertarik membuat penelitian yang berjudul “ **Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 Di Nagori Silou Huluan Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun**”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah salah satu tahap diantara sejumlah penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana implementasi program bantuan sosial tunai dalam upaya mengatasi masalah ekonomi akibat pandemic covid 19 di Nagori Silou Hulan.
2. Faktor apa yang menjadi hambatan dalam implementasi program BST di Nagori Silou Hulan.

1.3 Tujuan Peneliti

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui implementasi program bantuan sosial tunai terhadap masyarakat yang tidak mampu yang terdampak pada kondisi wabah virus Covid-19 di Nagori Silou Hulan Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui apa hambatan dalam implementasi program BST di Nagori Silou Hulan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis
 - a) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
 - b) Serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terkait Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai dalam upaya

mengatasi masalah ekonomi akibat pandemic covid 19 di Nagori
Silou Hulu Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.

2. Secara praktis

- a) Sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti yang melakukan penelitian dimasa yang akan datang.
- b) Untuk lebih membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.



BAB II

LANDASAN TEORI

1. Kebijakan

1.1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh individu atau sekelompok actor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih serta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana putusan tersebut masih berada dalam batas-batas kewenangan actor tersebut. Menurut Ealau dan Prewitt (1973) Kebijakan adalah suatu ketetapan yang berlaku yang di cirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Menurut Lasswell dan Kaplan dalam Ali (2006: 4), menjelaskan arti kebijakan sebagai: *“a projected of goals values and practices”* “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek terarah”. Sementara itu, menurut Carl J. Friedrich kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan (Ali 2006: 4).

1.1.2 Jenis-jenis Kebijakan

Menurut Anderson dalam Nudin (2013: 11), kebijakan terbagi jadi dua bagian yaitu kebijakan substantive yang artinya adalah kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah mengenai pembangunan yang ada didaerah. Misalnya, pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya. Sedangkan kebijakan procedural adalah kebijakan mengenai siapa yang akan diberi kewenangan mengambil keputusan. Yang dimaksud dalam kebijakan procedural adalah undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan suatu badan tertentu serta proses yang akan dijalankan.

1.2 Implementasi Kebijakan

1.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Meter dan Horn dalam Akib (2010: 2), implementasi kebijakan yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah atau swasta, baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam penelitian Nakamura tentang, *Policy Implementation: Topic In American Politic*. Implementasi adalah apa yang seharusnya terjadi setelah kebijakan dibentuk. Hal ini sering menjadi bagian yang menarik dari proses pembuatan kebijakan karena merupakan titik dimana ide-ide seharusnya diterjemahkan ke dalam tindakan yang meningkatkan hasil yang akan dicapai (Silitonga, 2017: 8-9).

Secara praksis implementasi kebijakan dibutuhkan buat melihat kesesuaian serta relevansi model deskriptif yang dibuat. Implementasi kebijakan sangat

dibutuhkan, sebab pada sesi seperti itu bisa dilihat “ kesesuaian” bermacam aspek determinan keberhasilan implementasi kebijakan ataupun program.

Supaya sesuatu proses implementasi kebijakan bisa mewujudkan tujuan yang di idamkan, hingga bagi Darwin dalam Monalisa (2017: 18), terdapat sebagian perihal yang wajib dicermati dalam persiapan proses implementasi kebijakan. Dalam perihal ini, paling tidak terdapat 4 perihal penting dalam proses implementasi kebijakan, ialah pendayagunaan sumber, perlibatan orang ataupun sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, serta penyediaan layanan serta manfaat pada public.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van meter dan Van horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) diidentifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah terealisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu,

ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur, karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, kita diperlukan dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen. Tetapi, dalam beberapa hal ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus didedukasikan oleh peneliti perorangan. Pada akhirnya pilihan ukuran-ukuran pencapaian bergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya financial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antarpemerintah, dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang penting. Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Kedua, atasan dapat menyadarkan pada bagian sanksi baik positif maupun negative.

4. Karakteristik agen pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan, karakteristik agen pelaksana ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menyetujui beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan

2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unti dan proses-proses dalam badan pelaksana
 3. Sumber-sumber politik suatu organisasi, misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislative dan eksekutif)
 4. Vitalitas suatu organisasi
 5. Tingkat komunikasi “terbuka” yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu diluar organisasi
 6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.
5. Sikap para pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-presepsi pelaksana dalam yuridiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka mungkin mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan yaitu, kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut dan begitu sebaliknya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan system nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

6. Lingkungan ekonomi sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

1.3 Pemerintah

1.3.1 Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pemerintah merupakan suatu system yang menjalankan wewenang atau kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya.

Ensiklopedia Nasional Indonesia dalam Ali dan Alam (2016: 3), memberikan terminology “Pemerintah” dalam dua sisi pengertian, yaitu pengertian secara sempit dan dalam pengertian secara luas. Secara sempit pemerintah diartikan sebagai

pemegang kekuasaan eksekutif. Sedangkan pengertian secara luas pemerintah adalah seluruh lembaga dan kegiatannya dalam suatu Negara, termaksud hal-hal yang berhubungan dengan legislative dan yudikatif. Pengertian ini memberikan makna bahwa pemegang kekuasaan tidak saja difokuskan pada lembaga eksekutif akan tetapi mereka para pelaku kelembagaan dalam berbagai kegiatannya dalam kehidupan suatu Negara baik itu lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Pemerintah dibagi atas dua bagian yaitu: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Ali dan Alam 2016: 3).

Pemerintah pusat ataupun biasa dikatakan pemerintah merupakan sebutan universal buat pemerintah suatu negara yang mengatur jalannya pemerintahan. Pemerintah pusat yang dimaksudkan dalam perihal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara yang dibantu oleh wakil Presiden serta Mentrinya. Sedangkan pemerintah daerah merupakan entitas yang dibangun buat menjalankan roda pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah yang dimaksudkan disini yakni kepala daerah selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengetuai penerapan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

1.3.2 Fungsi Pemerintah

Mengacu pada pengertian pemerintah pada uraian diatas, maka secara umum terdapat 4 fungsi utama pemerintah, yakni sebagai berikut:

- a) Fungsi Pengaturan, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mempunyai fungsi pokok yakni membuat peraturan perundang-

undangan dalam rangka mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat supaya tercapainya kehidupan yang lebih dinamis dan harmonis.

- b) Fungsi Pelayanan, secara umum pelayanan ini yakni meliputi pelayanan public juga pelayanan sipil, berdasarkan yang mengedepankan kesetaraan. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk masyarakatnya ialah mencakup masalah hubungan luar negeri, peradilan, agama, keuangan, dan pertahanan.
- c) Fungsi Pembangunan, pemerintah perlu melakukan berbagai pembangunan diseluruh pelosok negeri baik itu pusat atau daerah. Dimana dimaksud pembangunan disini ialah bukan sekedar melakukan pembangunan infrastruktur saja, namun juga melakukan pembangunan mental spiritual warga Negara.
- d) Fungsi Pemberdayaan, ialah untuk mendukung otonomi daerah masing-masing, sehingga mengelolah daerahnya sesuai dengan sumber daya yang ada secara maksimal. Selain itu, demi mencapai tujuan tersebut, tentu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran dari masyarakat atau swasta dalam setiap kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pemerintahan (Ilyas, dkk, 2020: 47).

1.3.3 Tujuan Pemerintah

Lembaga pemerintah atau pemerintahan dibentuk tentu dengan beberapa tujuan. Adapun tujuan pemerintah dalam (<https://pelayananpublik.id>, diakses 21 Oktober 2020), yakni sebagai berikut:

- a) Melindungi hak asasi manusia.

- b) Menjalankan konstitusi sehingga setiap warga Negara diperlakukan dengan adil.
- c) Melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsur yang mengancam baik dari dalam maupun dari luar.
- d) Memajukan kesejahteraan umum.
- e) Membuat dan menjaga system moneter sehingga memungkinkan perdagangan domestic dan internasional berjalan dengan baik.

Dengan uraian penafsiran pemerintah beserta fungsinya dan tujuannya, hingga pasti bisa dilihat kalau kedudukan pemerintah pada suatu Negeri sangat besar. Sehingga, seorang ataupun lembaga yang ditugaskan dan bertujuan demi kesejahteraan Negeri, hingga wajib dilakukan dan dijalankan dengan baik serta pas.

2.4. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang terkena dampak Covid-19, yang belum pernah menerima Bansos reguler, yakni Program keluarga harapan (PKH) dan Program Sembako (<https://kemensos.go.id>, diakses pada 29 Desember 2020). Tujuan dari program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19. Mengenai Program BST, sudah diatur dalam Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020, tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Kebijakan ini di keluarkan untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Bantuan Sosial Tunai yang di berikan oleh Kementerian Sosial RI di maksudkan dapat membantu meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat akibat virus Corona.

Penerima BST adalah warga yang dianggap layak menerima bantuan dan terkena dampak ekonomi langsung akibat pandemi covid-19. Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Di antaranya sebagai berikut:

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BST tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.
4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
5. Calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat

bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.

6. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BST akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.

Penyaluran Bansos dilakukan melalui dua cara yaitu penyaluran dilakukan oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) melalui rekening keluarga penerima manfaat dan penyaluran Bansos dilakukan oleh PT.POS Indonesia melalui saluran BST (Bansos Tunai) di kantor pos, dan saluran Bansos langsung di tempat tinggal. Tetapi dalam menjauhi penimbunan serta antrian panjang dalam proses penyaluran BST di sebagian wilayah, Pihak PT. POS Indonesia secara serentak melakukan penyaluran di sebagian titik di setiap kecamatannya berkolaborasi dengan pihak kecamatan serta kelurahan dengan memakai sarana antara lain kantor POS, Kantor kecamatan / lurah serta gedung sekolah sekolah.

World Health Organization (WHO) sudah mendeklarasikan kalau wabah virus corona ataupun COVID- 19 telah dikategorikan selaku pandemi global serta menyebar ke nyaris segala Negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Informasi korban COVID- 19 ini dinamis serta terus meningkat. Pandemi yang menyebar ke segala negeri di dunia membuat negara-negara terdampak mempersiapkan kebijakan proteksi sosial kepada warganya. Semenjak akhir Maret 2020 Indonesia pula ikut menerapkan dorongan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 berbentuk duit tunai lewat sebagian program, antara lain Program Keluarga Harapan

(PKH) serta Dorongan Sosial Tunai (BST) melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, serta berbagai program bantuan sosial yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sudah melaksanakan kajian terhadap sebagian program dorongan sosial pandemi COVID-19. Bagi ringkasan kebijakan yang dikeluarkan TNP2K, pemerintah dalam program bantuan sosial pandemi COVID-19 ini wajib melaksanakan bermacam langkah strategis, semacam melindungi harga jual pangan, meningkatkan mutu pangan, melakukan sosialisasi dan pemantauan serta penilaian, menjaga prediksi konflik sosial di lapangan terpaut penyaluran dorongan, serta bermacam saran lain. Program Jaring Pengaman Sosial lewat Dorongan Sosial Tunai, ialah salah satu kebijakan berbentuk pemberian dorongan stimulan berbentuk duit tunai yang bertujuan untuk menolong warga miskin serta masyarakat terdampak COVID-19 ini supaya sanggup mempertahankan kehidupannya agar tidak jatuh ke lembah kemiskinan yang lebih dalam.

2.5. Studi Relevan

Judul yang akan peneliti kaji berbeda dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat kemiripan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian relevan ini menjadi titik tolak ukur untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun kemiripannya, diantaranya pada penelitian:

1. Penelitian Aldi Sajian (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Aldi Sajian pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram Tahun 2020”. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram Tahun 2020. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram Tahun 2020. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Standar dan Sasaran Kebijakan dalam Implementasi program BST di Kota Mataram bisa dibilang sudah cukup efektif. Dan dari aspek prosedural telah telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, meskipun secara nominal dana bantuan tersebut tak sepenuhnya mampu membendung kebutuhan mereka dalam sebulan.

2. Penelitian ST. Syahrini (2021)

Penelitian ini yang dilakukan oleh ST. Syahrini tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Oleh Kementerian Sosial RI Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten

Takalar”. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan penentuan keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Takalar dan untuk mengetahui dan menggambarkan Pelaksanaan Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Takalar.

3. Penelitian Andi Ainun Juniarsi Nur (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ainun Juniarsi Nur tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program bantuan sosial tunai terhadap kelompok miskin terdampak covid-19 di Kelurahan Tamamaung serta untuk mengetahui pemanfaatan bantuan sosial tunai dalam masa pandemic covid-19 di Kelurahan Tamamaung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan dasar penelitian studi kasus dengan subyek penelitian adalah 6 orang yang terdiri dari penerima manfaat BST, aparat kelurahan, dan keluarga penerima manfaat BST di Kelurahan Tamamaung. Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi BST di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang berjalan kurang baik secara umum dapat dilihat dari tidak dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak mengetahui tentang prosedur syarat serta kriteria masyarakat yang mendapatkan BST tersebut. Serta verifikasi data tidak dilakukan karena, menggunakan data DTKS dari Kementerian Sosial dan data yang

digunakan sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang, akibatnya banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan BST. Dan juga tidak ada jadwal yang tetap dalam pencairan yang mengakibatkan proses pencairan tidak berjalan dengan semestinya. Sedangkan pemanfaatan BST mayoritas menggunakan dana BST untuk kebutuhan pokok, perlengkapan sekolah dan modal usaha.

4. Rahmi Fadilah Siregar (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Fadilah Siregar tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan peneliti adalah Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada dilapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disese* 2019 Di

Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabunga Utara adanya pemotongan dana atau yang disebut dengan KKN, kemudian faktor pendukungnya karena munculnya sosialisasi program pengeluaran BLT Dana Desa, Sementara faktor penghambatnya yaitu kurang tegasnya sikap seorang pelaksana, adapun dilihat dari Tinjauan fiqh siyasah berdasarkan pendistribusian pengeluaran dan belanja negara harus adil namun yang dilaksanakan otoritas yang bersangkutan belum adil.

5. Supiyarno (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Supiyarno tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Balangan di Luar Daerah yang Terdampak Covid 19 (Studi Kasus : Mahasiswa Balangan di Malang). Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Balangan di Luar Daerah yang Terdampak Covid 19. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten balangan. Penulis mengumpulkan data-data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses koleksi data, editing data, dan interpretasi data. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori yang telah ada. Hasil penelitian ini

adalah bahwa Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa balangan diluar daerah yang terdampak covid-19 di Malang telah dilaksanakan, namun belum maksimal di karenakan ada beberapa kendala seperti; Sulitnya dalam mensosialisasikan program karena tidak semua mahasiswa balangan diluar daerah tergabung didalam kerukunan mahasiswa balangan di malang, belum familiarnya menggunakan aplikasi seperti *zoom meeting* untuk mensosialisasikan program, tidak semua mahasiswa balangan diluar daerah memiliki nomer rekening bank.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan garis pemikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana penelitian dari awal melalui proses pelaksanaan hingga akhir.

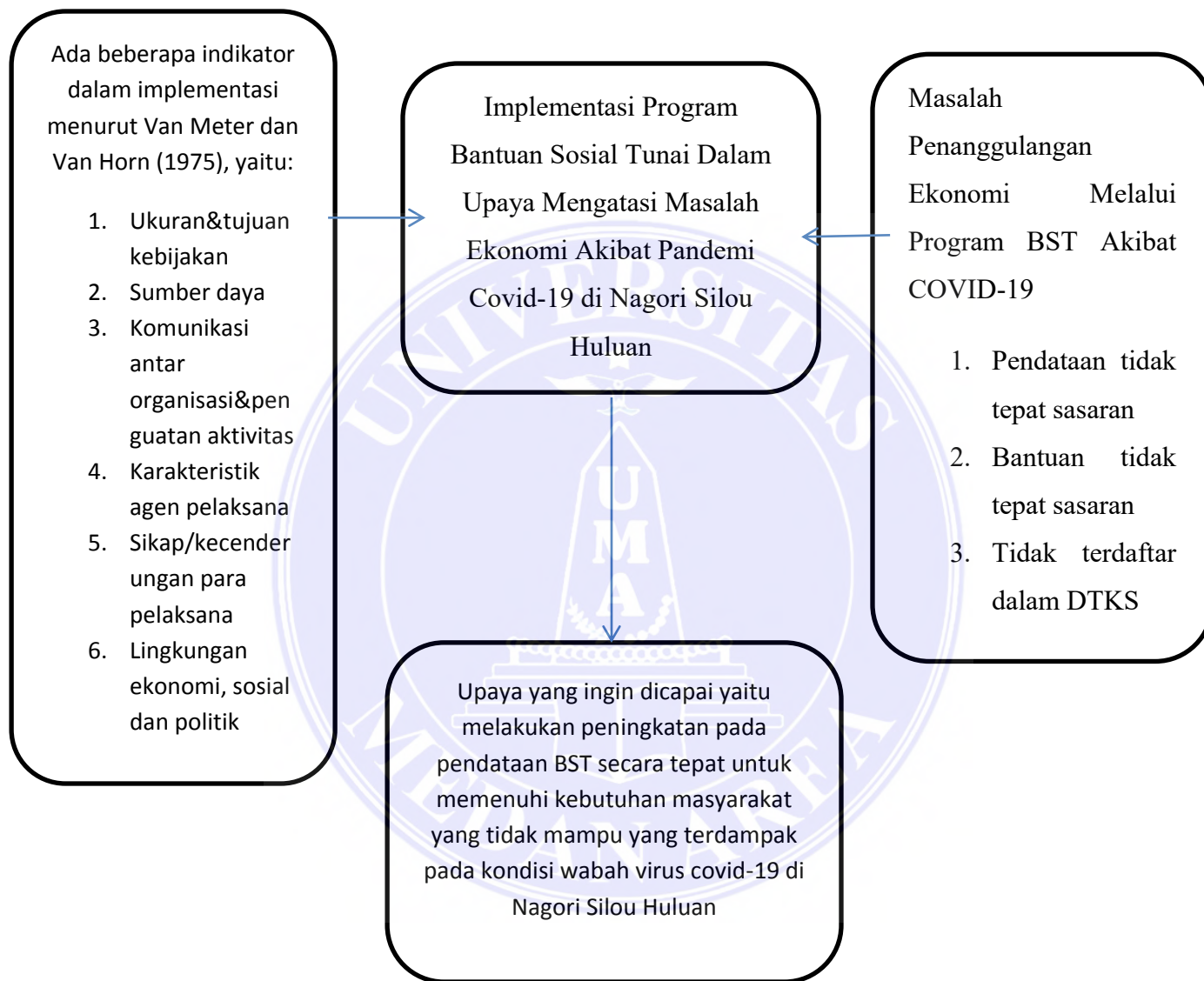
Kerangka berpikir juga dapat diartikan sebagai hubungan antar variabel yang disusun oleh teori yang diuraikan kemudian dianalisis lagi secara kritis dan sistematis untuk mensintesis hubungan antar variabel penelitian. Kerangka pemikiran alur pemikiran penulis sendiri atau bahkan suatu teori yang dianggap relevan atau terfokus untuk menanggapi permasalahan yang muncul dalam rumusan masalah penulis.

Penulis mengambil teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan. Adapun indikator-indikator implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan, diidentifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan.
2. Sumber daya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, implementasi akan berjalan efektif bila ukuran dan tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan.
4. Karakteristik agen pelaksana, karakteristik badan-badan pelaksana dalam hal ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi.
5. Sikap/kecenderungan para pelaksana, setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, hal ini perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan.

Adapun kerangka pemikiran penelitian yang digambarkan oleh penulis adalah sebagai berikut.



Bagan 2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogh dan & Biklen, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sikap orang-orang yang diamati (1975). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan (Moleong, 2018: 6).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun didalam melihat kebenaran tersebut, tidak cukup dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh kebalik sesuatu yang nyata tersebut (Moleong, 2018: 6).

Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melihat kondisi subjek yang diteliti secara alamiah dan apa adanya. Penelitian akan melakukan pengamatan dari apa yang terjadi di Kabupaten Simalungun tepatnya melakukan penelitian di Nagori Silou Hulan Kabupaten Simalungun, terutama pada pendataan Bantuan Sosial Tunai.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 13), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Kebijakan atas suatu masalah dapat menjadi solusi yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran serta pemerintah untuk memberikan implementasi dari suatu kebijakan, harus sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Pada penelitian deskriptif ini, peneliti juga menganalisis terutama pada masyarakat yang tidak dapat bantuan dan yang tidak tercantum keluarganya dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) serta menganalisis pegawai yang mendata masyarakat.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis adalah di Nagori Silou Hulan tepatnya di Kantor Kepala Desa Nagori Silou Hulan Kabupaten Simalungun.

Adapun tahapan perincian kegiatan yang dilakukan sebagaimana tertera pada tabel 3.1 berikut ini:

No	Kegiatan	Bulan Ke:								
		Oktober 2021	November 2021	Desember 2021	Januari 2022	Februari 2022	Maret 2022	April - Juni 2022	Agustus 2022	September 2022
1.	Penyusunan proposal									
2.	Seminar proposal									
3.	Perbaikan proposal									
4.	Pengambilan data/penelitian									
5.	Penyusunan skripsi									
6.	Seminar hasil									
7.	Perbaikan skripsi									
8.	Sidang meja hijau									

Tabel 3.1: Waktu Penelitian

3.4. Informan Penelitian

Informan menurut Arikunto (2013: 130) adalah keseluruhan subjek penelitian. Informan sangatlah penting dalam penelitian ini, dikarenakan penelitian ini bersifat deskriptif. Timbulnya suatu masalah tentu ada sebab dan akibatnya dan cara untuk mengatasinya. Dan orang yang memberikan informasi dapat dikatakan dengan responden apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh peneliti.

Informan penelitian adalah orang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

1. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Nagori Silou Huluan Kabupaten Simalungun Bapak Dr. Edi Sinaga.
2. Informan utama dalam penelitian ini adalah Gamot/Kepala Dusun Rindung Bapak Lepson dan Bapak Muhtar Parulian Purba sebagai Operator Desa.
3. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagori Silou Huluan yang menerima bantuan sosial tunai yaitu Ibu Minarlina Saragih dan Ibu Ramesti Purba serta Ibu Tiodora Sinaga.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014: 224) teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama nya dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (interview), pengamatan (observasi), dan dokumen.

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015: 72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

2. Observasi

Widoyoko (2014: 46) observasi merupakan “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”. Sugiyono (2014: 145) “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis”. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Desa Silou Huluan Kabupaten Simalungun.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018: 476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018: 482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman (2012: 255) yang meliputi:

1. Pengumpulan Data, merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.
2. Reduksi Data, merupakan sebagai proses pengambilan yang terfokus pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi dari data yang muncul dari catatan yang ditulis di lapangan selama penelitian dilakukan untuk memilih informasi yang dianggap sebagai tempat penelitian lapangan.
3. Penyajian Data sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan atau mengambil tindakan. Pengumpulan data ini bisa membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi berdasarkan pemahaman dan mengarah pada analisis dan tindakan lebih lanjut.

4. Kesimpulan Data, dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula masih tidak jelas menjadi lebih terperinci melalui verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk tahap pengumpulan data selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pangulu Nagori Silou Huluan mengenai Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Nagori Silou Huluan. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai di Nagori Silou Huluan dengan menggunakan indikator dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang terdiri dari indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Bahwa Kementerian Sosial sudah menjalankan tugasnya untuk membantu masyarakat tidak mampu/miskin dengan menetapkan persyaratan bahwa terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Akan tetapi, dalam hal ini pangulu maupun perangkat desa Nagori Silou Huluan tidak ada melakukan pendataan. Hal tersebut dapat dilihat dengan ketidaktepatnya sasaran bantuan tersebut yang diterima pangulu nagori silou huluan, dimana masih ada nama yang salah, nik tidak ada serta nama-nama yang mendapat bantuan itu-itu saja. Kemudian dapat dilihat bahwa masih ada masyarakat yang tidak mampu tidak terdata dalam DTKS padahal pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut. Serta data diterima Kemensos dari kecamatan dan

bisa saja itu data lama dan seharusnya data dilakukan ulang terhadap masyarakat tidak mampu di Nagori Silou Huluhan karena bantuan ini baru dikeluarkan Kemensos pada masa covid-19.

2. Hambatan dalam Penanganan Bantuan Sosial Tunai ini ialah kurang bagusnya akses menuju ke nagori silou huluhan. Sehingga Kemensos tidak melakukan pendataan langsung ke nagori silou huluhan. Kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti transportasi yang susah, jaringan yang susah. Apalagi jaringan sangat susah untuk menginput data masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan lain yang diberikan pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Nagori Silou Huluhan, penulis memberi saran sebagai berikut:

- a. Kementerian Sosial sebagai penyelenggara bantuan sosial tunai tersebut, agar bekerja sama dengan pemerintah desa nagori silou huluhan untuk mencegah ketidaktepatannya sasaran bantuan supaya tidak terjadinya kesalahpahaman masyarakat terhadap Pemerintah desa.
- b. Perlunya evaluasi secepatnya terhadap pangulu beserta perangkat desa agar masyarakat yang belum dapat bantuan supaya didata agar terdaftar dalam DTKS dan bisa dapat bantuan lainnya yang diberikan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Wahab, Solichin. 2017. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* Volume 6, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Abidin,Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.

Akib, H. (2010). *Implementation Kebijakan. Administrasi Publik, 1* (1), 2-11.

Ali, Muhammad. (2006). *Kebijakan publik*. Yogyakarta: Genta press.

Ali, F., & Alam, A. S. (2016). *Studi kebijakan pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama.

Asmanto, P., Hidayat, T., Maulana, M., Suryanto, G.I., & Adji, A. (2020). Pengutamaan Penggunaan Dana Desa: *Bantuan Langsung Tunai Desa*. Ringkasan Kebijakan TNP2K.

Habibullah, Sitepu, A., Mujiyadi, B. Susantyo, B. Nainggolan, T., Irmayani, Sugiyanto, & Suradi (2017). *Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Kemensos RI. 2020. *Reformasi Pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial, Buku Putih 2020l.*, Jakarta. Pusat Data informasi kesejahteraan sosial.

Meter, V., & Horn, V. (1975). *The policy implementation process. Administration & Society*.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Winamo Budi. 2012, *Kebijakan Public (Teori dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: Buku Seru.

Skripsi:

Aldi Sajian, 2021, Skripsi Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi *Covid-19* Di Kota Mataram Tahun 2020.

Andi Ainun Juniarsi Nur, 2021, Skripsi Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19 (studi kasus: Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Pamakkukang Kota Makassar).

ST. Syahrini, 2021, Skripsi Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Oleh Kementerian Sosial RI Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Takalar .

Rahmi Fadilah Siregar, 2021, Skripsi Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

Supiyarno, 2021, Skripsi Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Balangan di Luar Daerah Yang Terdampak Covid 19 (studi kasus: Mahasiswa Balangan di Malang).

WEBSITE

<https://apransiregar.wordpress.com>, diakses pada 20 Desember 2020).

<https://pelayananpublik.id>, diakses 21 Oktober 2020

<https://www.kemensos.go.id> diakses pada 29 Desember 2020

PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Maujana Nagori di Kabupaten Simalungun.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian



Kantor Pangulu/Kepala Desa Nagori Silou Huluan

(Jumat 28 Januari 2022)



Dokumentasi peneliti dengan informan kunci yaitu Bapak Drs. Edi Sinaga, selaku Pangulu/Kepala Desa Nagori Silou Hulan. (Sabtu 29 Januari 2022)



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan utama yaitu Bapak Lepson Purba, selaku Gamot/Kepala Dusun Rindung. (Sabtu 29 Januari 2022)



Dokumentasi peneliti dengan informan utama yaitu Bapak Muhtar Parulian Purba, selaku Operator Desa ketika melakukan wawancara. (Jumat 28 Januari 2022)





Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan utama yaitu Bapak Muhtar Parulian Purba selaku Operator Desa



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Ibu Minarlina Saragih selaku masyarakat yang menerima bantuan sosial tunai



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Ibu Ramesti Purba sebagai masyarakat penerima bantuan sosial tunai.

Lampiran 2: Data Informan

1. Informan Kunci

Nama : Drs. Edi Sinaga
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 54 Tahun
Jabatan : Kepala Desa

2. Informan Utama

Nama : Lepson Purba
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 47 Tahun
Jabatan : Gamot/Kepala Dusun Rindung

3. Informan Utama

Nama : Muhtar Parulian Purba
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 29 Tahun
Jabatan : Operator Desa

4. Informan Tambahan

Nama : Minarlina Saragih
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 45 Tahun
Pekerjaan : Petani dan Ibu Rumah Tangga

5. Informan Tambahan

Nama : Ramesti Purba
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 50 Tahun
Pekerjaan : Petani dan Ibu Rumah Tangga

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan untuk informan kunci yaitu Kepala Desa.

1. Apa saja hambatan Kantor Pangulu Nagori Silou Huluan dalam Implementasi Bantuan Sosial Tunai?
2. Bagaimana sikap para pelaksana dalam menjalankan kebijakan program Bantuan Sosial Tunai?
3. Apakah semua perangkat desa yang sudah diberikan tugas melaksanakannya sesuai pemosisian/jabatan?
4. Apa-apa saja kriteria/syarat untuk mendapatkan bantuan?
5. Berapa jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial tunai?

Daftar pertanyaan untuk informan utama yaitu Gamot/Kepala Dusun Rindung dan Operator Desa.

1. Apakah bantuan sosial tunai yang diberikan kepada masyarakat sudah terealisasi dengan baik?
2. Apakah ada permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial tunai?
3. Apakah ukuran dan tujuan dari Bantuan Sosial Tunai sudah berjalan dengan efektif?
4. Bagaimana menurut anda sikap para pelaksana dalam menjalankan program bantuan sosial tunai?
5. Apakah semua perangkat desa sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan?

Daftar pertanyaan untuk informan tambahan yaitu masyarakat Nagori Silou Huluan.

1. Bagaimana anda melihat pemerintah menjalankan program bantuan sosial tunai maupun bantuan sosial lainnya?
2. Apa-apa saja bantuan sosial yang diberikan pemerintah?

3. Apakah menurut anda proses pendataan bantuan yang dilakukan pemerintah sudah berjalan efektif?
4. Apa manfaat dari bantuan yang anda dapat? apakah bantuan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari?
5. Apakah anda pernah dapat bantuan dari pemerintah?

